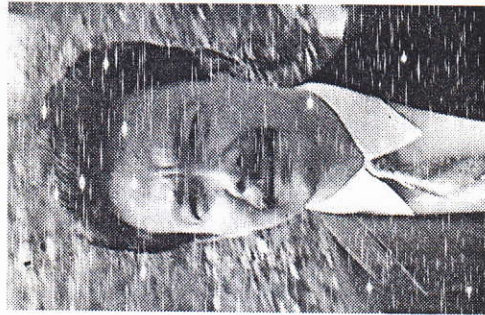


Air Harus dikuasai Negara untuk Kemakmuran

Oleh ASEP SUMARYANA



Bisa jadi urusan air bersih menjadi rawan perselisihan di banyak tempat. Banyak yang ingin menguasai sumber air bersih semacam itu dengan mengabaikan kepentingan orang banyak di sekitarnya. Banyak pula yang melakukan pengeboran untuk memenuhi kebutuhan industri dengan melanggar ketentuan yang berlaku. Ada banyak yang sejahtera dengan air bersih, sementara tetangganya nelangsa karena harus bersusah payah mendapatkannya.

Pemborosan air

Jika air digunakan untuk kebutuhan pokok oleh sekelompok orang, mungkin akan lebih banyak yang menikmatinya. Sementara jika terjadi ketimpangan konsumsi, mungkin lain ceritanya. Banyak pihak yang merasa kebutuhan air sangat banyak untuk digunakan fasilitas miliknya. Kolam renang yang dibuat oleh orang berada, tentunya membutuhkan banyak air bersih yang dialirkan dari mata air yang tersedia. Tidak jarang sumber airnya disedot dengan pompa

dari bawah tanah. Beberapa hari sekali, air tersebut dikuras dan diisi ulang sehingga kebersihan dan kesehatannya dapat terjaga. Mungkin bila dibagikan kepada tetangga yang membutuhkannya, bisa mencukupi kebutuhan air bersih satu RT.

Bagi sebagian orang, air bersih diperlukan untuk berendam dengan suhu tertentu dalam *bath tub*. Tentu kebutuhan untuk satu orang itu bisa menghabiskan kebutuhan air untuk beberapa orang. Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, banyak yang memiliki fasilitas mandi seperti itu. Ironisnya banyak orang di sekitar itu yang kesulitan memperolehnya. Memang, hal demikian membuat bisnis air bersih yang dijual dengan kereta dorong menjadi cukup menjanjikan, namun menjadi tidak sehat takala sebagian kalangan *the have just*רו mengham-burkannya.

Banyak rumah mewah ataupun hotel yang memiliki fasilitas semacam yang disebutkan tadi berlokasi di tengah wilayah yang memiliki persediaan air pas-pasan. Kemampuan keuangan yang baik menyebabkan pemilik rumah

dan hotel bisa menggali air bersih sedalam mungkin, legal ataupun ilegal. Hal seperti itu dikawatirkan bisa mengganggu persediaan air tanah warga sekitar. Izin pengambilan air tanah bisa saja direayasa atau dilanggar dengan penambahan sejumlah titik yang disembunyikan. Hal semacam ini menyebabkan orang itu makmur dengan air, sementara di luar rumah atau hotel tersebut banyak warga yang kekurangan air.

Dikuasai negara

Tampaknya air harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama. Hal itu sejalan dengan pesan UUD 1945. Munculnya penguasa air dari kalangan swasta tampaknya perlu diatur lebih cermat. Banyak pihak swasta sudah mulai mencari lahan yang memiliki sumber mata air untuk dikomersialkan. Bisa jadi

bukan hanya untuk kepentingan AMDK, namun juga bisa dijual seperti halnya PDAM. Privatisasi ini bisa jadi menimbulkan diskriminasi untuk kemudian memicu kecemburuan sosial.

Sebagai penguasa, negara

tampaknya perlu membuat regulasi pemakaian air. Air digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah tidak sebatas menarik pajak pengalibila. air. Namun, regulasi supaya tidak ada yang sewenang-wenang dalam pemanfaatan air.

Sebagai pelayan lingkungan (Anshoff, 1980), pemerintah perlu bertumpu pada aspek keadilan. Masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang harus dilayani secara proporsional. Menempatkan masyarakat sebagai konsumen, akan berarti pemerintah melakukan diskriminasi, yakni memberikan diskriminasi *satisfaction*, namun tidak melakukannya kepada masyarakat yang tidak mengaksesnya. Oleh karena itu, konsepsi Denhardt (2005) tentang *new public service* perlu dilirik untuk menekan diskriminasi.

Sebagai penguasa, negara yang direpresentasikan pemerintah, perlu memperhatikan manfaat air agar memiliki fungsi sosial ketimbang komersial. Kiranya tepat jika pemerintah menyisir pemilik rumah yang melakukan pemborosan

air sementara tetangganya kesulitan. Untuk perusahaan yang mengonsumsi air banyak seperti pabrik dan hotel perlu juga disisir agar tidak terjadi pemborosan. Mungkin saja hal ini akan menyebabkan *sim sim abim* dengan petugas, maka sudah waktunya juga tindakan tegas diberikan kepada petugas yang nakal dan merugikan masa depan bersama.

Dengan membuat formulasi pengaturan air, tentu akan menciptakan kehidupan yang lebih tenteram. Air pun bisa memberikan manfaat bagi petani, warga masyarakat, dan juga siapa pun yang memanafaatkannya. Jangan sampai ada mata air yang dikuasai perseorangan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dirinya, jangan pula ada perseorangan yang mengeksplorasi air sebanyak mungkin semestara yang lainnya kesulitan. Hindari pula perseorangan yang mengomersialkan air yang telah Tuhan sediakan untuk dimikmati dan dijaga bersama.***

Penulis, staf pengajar Jurusan Administrasi Negara FISIP Unpad dan Sekretaris LP3AN Unpad.

PR, 15/09/08

IV/49